

BAB IV

DAMPAK *CRYPTOCURRENCY* BAGI STABILITAS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI PERSPEKTIF NEO-MARXISME

4.1 Regulasi Terhadap *Cryptocurrency* di Indonesia

Perkembangan teknologi yang begitu cepat seringkali tidak dapat diimbangi dengan adanya regulasi yang tepat dan akurat dari Pemerintah. Berbeda dengan teknologi yang dikembangkan melalui inovasi-inovasi, regulasi dihasilkan dari aktivitas politik. Meskipun secara teknis masing-masing memiliki kerumitannya tersendiri, secara substansi aktivitas politik dipenuhi tarik-menarik kepentingan berbagai pihak. Bagi *Cryptocurrency* yang muncul dari pihak-pihak yang menentang intervensi Pemerintah dalam transaksi ekonomi, memungkinkan penyelewengan penggunaannya untuk kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang¹. Setidaknya isu-isu terkait resiko atau keburukan dari *Cryptocurrency* ini cukup menarik perhatian Pemerintah untuk membuat regulasi terhadapnya.

Cryptocurrency dianggap bermasalah, tetapi tidak ada yang bisa menampik kenyataan bahwa blockchain yang merupakan teknologi fundamentalnya merupakan suatu terobosan yang sangat penting dan bermanfaat. Pengembangan blockchain bahkan bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pelayanan publik seperti pencatatan sipil. Blockchain sekarang telah mengalami berbagai pengembangan sejak pertama kemunculannya.

¹ Muhammad Arif Furqon, SKRIPSI : "CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN PRESIDEN NICOLÁS MADURO DI VENEZUELA (TAHUN 2017-2019)" (Jember : UNIVERSITAS JEMBER,2020). Hlm. 55.

Namun perlu ditegaskan bahwa ketika Pemerintah secara terang-terangan menggunakan blockchain tentu publik secara tidak langsung akan semakin mengenal *Cryptocurrency*. Maka dari itu isu-isu terkait penyelewengan penggunaan *Cryptocurrency* semakin sulit untuk diatasi tanpa adanya regulasi yang memadai dari pemerintah. Terdapat paradoks dalam regulasi *Cryptocurrency*, paradoks ini muncul karena ketidakpastian yang masih lekat kaitannya dengan *Cryptocurrency*. Secara sederhana paradoks ini dihadapi Pemerintah karena jika keputusan yang diambil ialah melarang *Cryptocurrency* di negaranya, yang pada akhirnya ia mengabaikan kebaikan-kebaikan yang lekat pada *Cryptocurrency*. Namun karena ketegasan tersebut ada penekanan terhadap rasio adopsi sehingga risiko yang lekat pada *Cryptocurrency* bisa diminimalisir. Kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam *Cryptocurrency* lebih banyak dirasakan oleh pengguna. Maka penggunaannya yang tidak bisa dikontrol secara langsung oleh Pemerintah memungkinkan para pengguna untuk tetap memanfaatkan *Cryptocurrency* meski sudah dilarang sekalipun. Bahkan bisa semakin banyak yang mengadopsinya karena akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang *Cryptocurrency* melalui larangan yang muncul dari Pemerintah, dengan begitu resiko yang ada akan semakin sulit untuk diatasi.

Di Indonesia, bitcoin merupakan salah satu bentuk aset yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Aturan mengenai perdagangan bitcoin tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang telah dirubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan Kedua dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga dengan Perba Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut menjelaskan aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

4.2 Dampak Yang Ditimbulkan Oleh *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Indonesia

Dampak dari penggunaan uang virtual atau *Cryptocurrency* terhadap ekonomi Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Mengingat negara-negara besar yang memperbolehkan penggunaan mata uang virtual tersebut, memiliki keterkaitan perekonomian yang besar terhadap Indonesia. Kondisi anjloknya nilai uang virtual yang terjadi saat ini perlu diwaspadai. Sebab, hal itu berpotensi mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Negara pengguna *Cryptocurrency* terbesar seperti Jepang dan Korea. Jika sampai mengalami krisis pada mata uang mereka yang diakibatkan *Cryptocurrency* maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan terkena dampaknya. Transmisi pengaruh krisis yang disebabkan *Cryptocurrency* memang panjang, bahkan masih jauh. Di antara indikasinya, kapitalisasi pasar dari *Cryptocurrency* sangat kecil dibandingkan indeks saham, seperti *Jakarta Composite Index* (JCI), *South Korea Stock Exchange* (KRX), dan *Tokyo Stock Exchange* (JPX). Dari statistik yang ditunjukkan oleh *Bitcoinity.org* per 5 Februari 2018, kapitalisasi pasar *Cryptocurrency* senilai US\$153,36 miliar

per 4 Februari 2018. Sementara kapitalisasi pasar market cap JPX sebesar US\$5,12 Triliun, KRX US\$1.33 Triliun, dan JCI Rp7.390,39 Triliun. Yang paling penting untuk dicermati adalah mengenai bahaya dari uang virtual, baik dari fungsinya sebagai alat pembayaran dan juga sebagai komoditas. Bank Indonesia (BI) kembali mengingatkan bagi para pengguna bitcoin atau pemilik bitcoin di Indonesia untuk berhenti menggunakan atau berinvestasi pada mata uang virtual tersebut. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI menyampaikan bahwa peredaran dan volatilitas nilai tukar bitcoin yang semakin tinggi akan membahayakan stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Dari segi stabilitas sistem keuangan, BI juga mengkhawatirkan sisi volatilitas bitcoin. Hal ini sama seperti teori gaya gravitasi, jika bola diangkat tinggi sekali, maka saat dia jatuh akan sakit sekali rasanya. Kita tidak ingin krisis terulang lagi karena ada bubble. Begitu jatuh tiba-tiba, kalau krisis terjadi, yang kena adalah masyarakat. Selain itu, terdapat pula risiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan ketentuan yang lebih akomodatif. Lebih rinci, faktor yang paling berbahaya adalah proses penciptaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat transaksi yang dianggap berlebihan, baik dari sisi nominal maupun nilai harga yang disepakati, terutama dalam gambaran krisis ekonomi. Teknologi blockchain, selaku rahim lahirnya Bitcoin, menjadi salah satu peluang pemerintah untuk bisa bersaing dengan negaranegara lain dalam hal inovasi teknologi. Kita sudah ketinggalan jaman internet, jangan sampai ketinggalan di teknologi selanjutnya.²

² Endra Saputra, "DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA", Seminar

4.2.1 Resiko Yang Membuat Indonesia Rentan Terhadap *Cryptocurrency*

Indonesia adalah negara yang mudah diintervensi oleh pihak luar, ini terbukti jika kita lihat dalam sejarah. Sifat mudah diintervensi yang dimiliki oleh Indonesia ini dapat berdampak buruk terhadap langkah yang akan diambil. Karena tidak menutup kemungkinan kehadiran *Cryptocurrency* di Indonesia dijadikan alat untung menghagemoni oleh pihak lain.

Sebagai contoh, kita lihat kasus penggunaan *Cryptocurrency* yang terjadi di Venezuela yang tentunya diharapkan tidak terjadi hal serupa terhadap penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia.

Jatuhnya Venezuela sebagai negara kaya minyak dimulai pada 2014 ketika harga minyak dunia turun drastis. Minyak di Venezuela memperoleh 95% dari pendapatan ekspor. Ketika Presiden Hugo Chavez memimpin dari tahun 1999 hingga kematiannya pada tahun 2013, Chavez menggunakan sebagian dana tersebut untuk membiayai sejumlah program sosial untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan dinegaranya, namun sejak kematiannya dan jatuhnya harga minyak, Venezuela telah memasuki fase krisis. Pada saat kepemimpinan penggantinya, Nicolas Maduro, Venezuela semakin terlibat kedalam berbagai

krisis, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi dan politik. Pada tahun 2017, Maduro mengumumkan pernyataan yang menimbulkan pro dan kontra, Maduro menerapkan Cryptocurrency dengan nama "Petro" yang didukung oleh cadangan minyak, gas, emas dan berlian dengan klaim bahwa "Petro" bisa membantu Venezuela dalam mengatasi masalah kedaulatan moneter, untuk melakukan transaksi keuangan dan mengatasi blokade keuangan.

Maduro menjadikan "Petro" sebagai mata uang digital untuk jual beli minyak guna menjaga nilai jual yang diinginkan Venezuela dan menekan agar tidak terlalu terpengaruh hiperinflasi. Pada ranah domestik, Maduro ingin menekan protes atas penggulingannya sebagai Presiden dan tidak mengakui Juan Guaido (oposisinya yang mendapatkan legitimasi oleh berbagai Negara sebagai Presiden pengganti Maduro), sehingga penggunaan Petro diwacanakan pada rakyat Venezuela sebagai sebuah solusi. Hal ini menyebabkan Petro menjadi salah satu upaya yang ditempuh Maduro agar kondisi krisis terlihat ditangani dengan baik olehnya. Sedangkan pada ranah Internasional, tindakan Maduro dalam menerapkan Petro banyak mendapatkan kecaman dan hingga saat ini tidak bisa menuntaskan masalah krisis Venezuela, negara Amerika Serikat dan banyak negara sekutu Venezuela telah berpaling mendukung legitimasi Guaido sebagai Presiden Venezuela. Meski demikian Maduro dalam berbagai kesempatan

menyampaikan klaim kesuksesan Petro yang mana melalui penjualannya dia mampu mendapatkan dana internasional meskipun sedang dikenakan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat.

4.3 Pandangan Neo-marxisme Terhadap *Cryptocurrency*

Neo-Marxisme atau yang dikenal dengan strukturalisme dalam Hubungan Internasional. Ini merupakan teori turunan dari Marxisme yang berasal dari ilmu Sosiologi yang menjelaskan mengenai kelas sosial di dunia. Teori ini menjelaskan bahwa adanya ketidaksetaraan global dalam ranah internasional, selanjutnya teori neo-Marxisme ini tidak jauh berbeda dari teori Marxisme yang melihat dunia saat ini terpusat kepada para pekerja industri yang di dalamnya ada para pemilik modal serta para pekerjanya yang memiliki tenaga untuk dijual. Pemilihan teori ini karena dalam melihat permasalahan yang terjadi yaitu terkait fenomena mata uang virtual di Indonesia yang sedang berkembang di Indonesia, sehingga penggunaan teori ini akan dapat membantu penulis untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan asumsi-asumsi dalam teori tersebut.

Teori neo-Marxisme juga tetap mempertahankan beberapa asumsi dasar dari Marxisme yaitu seperti adanya penolakan terhadap globalisasi. Selain itu, dalam pandangan teori neo-Marxisme ini melihat bahwa kebijakan luar negeri dalam suatu negara ditentukan oleh adanya kepentingan kelompok pengeksploitasi yang berasal dari negara maju, dan yang dieksploitasi yaitu negara terbelakang. Negara maju atau negara yang melakukan eksploitasi ini berusaha untuk terus mempertahankan status *quo* yang dimilikinya. Kemudian dalam melihat hal ini, negara berkembang ataupun negara dunia ketiga ingin

merubah status *quo* yang dimiliki, yaitu ingin menyingkirkan hubungan yang tidak adil atau dalam kata lain negara-negara ini ingin keluar dari adanya ketergantungan asimetris yang dilakukan oleh negara kelas atas. Dalam teori neo-Marxisme ini melihat bahwa negara-negara maju ingin berkembang, dan negara-miskin perlu tetap miskin dan hanya perlu mengembangkan fitur-fitur ekonomi di negara tersebut yang kemudian industri negara tersebut akan diminati oleh negara maju dalam perkembangannya.³

Berkenaan dengan tatanan dunia dan sistem internasional, neo-marxisme melihat kesemuanya itu sebagai sebuah sistem kapitalis dari rangkaian berbagai hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang saling terhubung dan secara bersama-sama membentuk sebuah struktur. Dengan artian, kaum neo-marxis melihat sistem kapitalis global sebagai suatu sistem yang menunjukkan mulai munculnya berbagai hubungan diantara para elit dengan saling berbagi kepentingan dasar. Neo-Marxisme memperluas analisis Karl Marx tentang pengeksploitasian antara kaum borjuis terhadap kaum proletar. Neo-Marxisme berpendapat bahwa perekonomian kapitalis global yang notabene dikendalikan oleh negara kapitalis kaya, dipergunakan untuk mengeksploitasi negara pinggiran (*periphery*).

Dengan hadirnya *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, dapat mengurangi ketergantungan Indonesia dengan mata uang Dollar yang mendominasi, dengan begini perlahan Indonesia dapat terlepas dari belenggu liberalisme dan juga kapitalisme yang menyengsarakan rakyat.

³ Sharen Gabriella, Skripsi: "Industri Fast Fashion dalam Perspektif neoMarxisme: Studi Kasus Buruh Fast Fashion di Bangladesh" (Jakarta: Universitas Pertamina, 2021), Hal.13.

4.3.1 Sosialisme dan Blockchain

Model sosialis dan kepemilikan publik melihat sifat kooperatif unik dari blockchain yang membuat teknologi tersebut ideal bagi masyarakat sosialis. Argumen itu untuk menentang tesis bahwa bitcoin dianggap sebagai alat Libertarian yang mendukung kemampuan Bitcoin untuk melewati otoritas pusat dan persoalan anonimitas penggunaannya. Huckle & White beranggapan, seharusnya fokus kajian juga menyoroti kapasitas teknologi blockchain terhadap transparansi dan kemampuan audit yang terdesentralisasi untuk mendukung sosialis. Masalah lembaga keuangan pihak ketiga yang memproses keuangan elektronik menyebabkan sengketa mahal, yang membuat pembayaran kecil berbasis internet untuk barang dan jasa tidak praktis karena biaya melebihi keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Selain itu penipuan menjadi endemik, yang mengandaikan kepercayaan antara pedagang dan pelanggan; tanpanya, sistem akan gagal.

Bitcoin mengatasi masalah ini melalui penggunaan bukti kriptografi yang memungkinkan pihak untuk bertransaksi secara langsung, sehingga menghilangkan peran pihak ketiga untuk memverifikasi pembayaran. Di sisi lain, BTC mengaburkan banyak kebutuhan kepercayaan yang melekat di dalam fiat, yakni uang yang ditetapkan sebagai pembayaran yang sah melalui peraturan pemerintah. Nilai-nilai politik Libertarian adalah: hak milik

pribadi, kebebasan berbicara, beribadah, persamaan hukum, dan otonomi moral. Pandangan klasik Libertarianisme memang mendukung kebebasan individu dalam preferensi untuk penilaian kolektif. Maka, hasilnya adalah skeptisisme yang mendalam terhadap kekuasaan negara dan pemerintah, serta keyakinan bahwa masyarakat harus dibebaskan dari sistem perbankan yang didukung oleh Negara. Meski begitu, pendukung semangat Libertarian mulai menyadari bahwa di balik semua aturan, regulasi terdapat jurang kosong. Sektor keuangan yang dibangun dalam sistem rantai pasokan keuangan yang rumit mulai menimbulkan kesusahan yang berakhir krisis di 2008. Karenanya, dukungan ideologis mereka terhadap Bitcoin cenderung didorong oleh keinginan untuk menghindari skala resiko seperti krisis ekonomi 2008. Resiko yang terjadi akibat krisis keuangan adalah mimpi buruk bagi Libertarian.

4.3.2 *Cryptosocialism* dan Mimpi-Mimpi Marx

Sosialisme adalah istilah yang mencakup banyak filosofi politik yang berbeda. Cabang utamanya adalah Marxisme, Sosialisme Utopis, dan Anarkisme. Meskipun berbeda, kesemuanya berbagi nilai egaliter, struktur masyarakat non-hierarkis, dan berbagai bentuk kepemilikan sosial, di mana alat produksi dan distribusinya dimiliki oleh suatu masyarakat⁴. Marx memang menginginkan Sosialisme terjadi sebagai dampak alami

⁴ Ghozian Pradhana, "Blockchain, Cryptosocialism, dan Impian Marx", <https://logosid.xyz/blockchain-cryptosocialism-dan-impian-marx/> (diakses pada 10 Juli 2021, pukul 7.10).

dari kapitalisme yang tumbuh berdasarkan konflik dan terdapat pertentangan di antara mereka yang bekerja, tidak memiliki apa-apa, dan kelas kapitalis yang memiliki alat-alat produksi.

Desain BTC Nakamoto yang didasarkan pada komunitas validator yang memberikan konsensus kooperatif memiliki kualitas yang sesuai dengan ideologi sosialis. Meski begitu, teknologi blockchain adalah bagian dari gambaran yang lebih besar, yakni masyarakat otonom terdesentralisasi. Dominasi perkembangan teknologi desentralisasi mendisrupsi bentuk-bentuk sentralistik dan hierarki dari sistem negara dan bangsa. Melalui model masyarakat otonom yang terdesentralisasi tersebut, diklaim dapat meningkatkan otonomi manusia dengan otomatisasi tata kelola organisasi. Sebab, model tersebut dapat berjalan tanpa keterlibatan manusia di bawah kendali seperangkat aturan bisnis yang tidak mungkin rusak (kecuali oleh komputasi kuantum). Elit politik dan bank sentral yang memiliki kekuasaan adalah penghambat kebebasan. Kebebasan dan demokrasi seringkali tak sejalan. Setiap *cryptosocialist* mendambakan suatu ruang yang membebaskan mereka dari belenggu kekuasaan dan politik. Bitcoin beserta blockchain dianggap mampu mencegah pemerintah mencetak uang serampangan untuk membeli senjata api, tank dengan tujuan menghancurkan kehidupan manusia seperti di negara dunia ketiga. Namun, Garrod juga tak luput mengingatkan tentang impian utopis

yang didorong oleh kemunculan Bitcoin masih dinodai oleh fantasi anti-pemerintah Libertarian.

Kombinasi blockchain dari *Cryptocurrency*, smart contract, dan database terdistribusi akan mengantarkan organisasi terdesentralisasi menggunakan kode untuk mendefinisikan tata kelola yang aman dan dapat diaudit. Selain itu, aset digital murni dari blockchain dapat digunakan masyarakat sosialis. Bagaimanapun, penggunaan mata uang digital dinilai lebih tepat ketimbang menggunakan fiat. Teknologi blockchain dapat mengikuti model publik. Bitcoin adalah blockchain publik, penambang bitcoin memiliki identitas yang tidak diketahui dan akses tak terbatas pada jaringan. Siapapun dapat mencatat transaksi valid di buku besar blockchain, dan siapapun dapat mengambil bagian dalam proses verifikasi transaksi. Itu menunjukkan kualitas “pemerintahan” yang ideal, transparansi dan kemampuan audit dalam teknologi blockchain memungkinkan penyimpanan catatan universal, permanen, berkelanjutan, didorong oleh konsensus, dan diaudit secara publik.

Tidak seperti mata uang kertas (fiat) yang bergantung pada agen terpusat untuk mengatur transaksi, Bitcoin unik karena dibuat di jaringan *peer-to-peer*. Jaringan blockchain berfungsi tanpa otoritas terpusat karena orang tidak perlu menaruh kepercayaan pada bank atau agensi terpusat untuk setiap tindakan transaksi.

Meskipun Bitcoin baru berusia kurang dari dua dekade, dengan memahaminya dalam selingkar teori sejarah, politik, dan ekonomi seperti sosialisme, kita bisa menemukan signifikansinya dengan semangat sosialisme Marx.

4.3.3 Signifikansi Bitcoin dan Marx

Memahami esensi argumen Abad ke-19, Marx dalam karyanya sering menggambarkan batasan dan masalah yang bersumber dari kapitalisme. Secara khusus, dalam Manifesto Komunis, Marx menekankan bahwa eksploitasi kaum proletar oleh kelas menengah dan borjuasi memungkinkan pasar terekstrapolasi, karena kebutuhan pasar terus tumbuh⁵. Konsekuensi yang dihasilkan dari sistem ekonomi tersebut adalah sentralisasi. Sementara properti dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan borjuis, sistem pemerintahan disatukan di bawah satu negara dan satu kode hukum.

Marx ingin proletariat memberontak dan membongkar semua bentuk hierarki sosial. Dengan sosialisme, kelas pekerja akan menciptakan negara dan negara akan mengatur semua alat produksi. Aspek desentralisasi Bitcoin dalam blockchain sejalan dengan semangat sosialisme. Jika komputer di blockchain membagikan informasi baru dan komputer lain tidak melacak atau merekam perubahan, informasi tersebut diabaikan. Sama seperti

⁵ Ibid.

Marx menganjurkan agar para pekerja menjadi negara, Satoshi menganjurkan pelanggan untuk menjadi bank. Dengan memotong perantara, setiap orang tidak perlu menaruh “*trust*” pada entitas terpusat. Menariknya, alasan untuk mendesentralisasi memiliki kedekatan antara Bitcoin dan sosialisme. Marx dan Satoshi sama-sama sepakat bahwa sulit mempercayai satu otoritas regulasi seperti bank. Marx percaya, meski tidak secara khusus mengklaim, ketika kapitalisme menjadi terlalu terpusat, itu mengarah pada produksi berlebih, dan produksi berlebih pada akhirnya menyebabkan kekacauan. Jika kita memeriksa krisis keuangan 2008, ketika orang terlalu fokus pada menghasilkan keuntungan melalui sekuritas beragun hipotek, Marx kemungkinan akan menganggap peristiwa ini sebagai produksi berlebihan sebagai akibat dari kapitalisme. *Cypherpunks*, pencipta dan peneliti *Cryptocurrency* mengutip bahwa tujuan mereka adalah memberikan alternatif dari keluhan penanganan keuangan modern. Lebih lanjut, negara tidak akan pernah dapat mengontrol suplai uang dengan cara yang dapat dipercaya. Sebagai gantinya, uang harus dikendalikan oleh “hukum alam” pasar. Artinya ini mengacu pada kemampuan Bitcoin untuk berfungsi dengan baik tanpa otoritas terpusat.

Pada akhirnya, Pengenalan dan adopsi Bitcoin ke dalam transaksi transglobal dapat mendefinisikan kembali bagaimana

ekonomi masa depan memandang Karl Marx dan pendekatannya. Kritik dan stigma negatif yang melekat pada tokoh sejarah bisa saja mendorong orang semakin ingin mencari tahu. Bitcoin dapat memicu wacana penting mengenai masalah-masalah seperti ketidaksetaraan kelas yang lazim muncul di dunia kontemporer⁶. Sama halnya dengan Marx dan kaitannya dengan Bitcoin dan blockchain, memiliki potensi konsekuensi sosial dan politik, *Cryptocurrency* yang terus berkembang pesat tentu juga mengalami berbagai tantangan sebelum menemukan akhir di era komputer kuantum, untuk memastikan teknologi blockchain dan Bitcoin memberikan dasar bagi perkembangan manusia yang progresif, kita harus memastikan bahwa itu digunakan untuk mengamankan hak-hak sosial kita, sebagai lawan dari cara negara dengan melarikan diri ke ruang pribadi yang dimediasi secara digital.

⁶ Ibid.